

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN DAERAH

Gusti Ayu Sonia Wina Laksmi¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: wina_laksmi@yahoo.com/telp:+62 85 73 82 42 589

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sebagai modal penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD adalah salah satu sumber pembiayaan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan PAD dan kontribusinya pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Gianyar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi nonpartisipan. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2009-2013 berdasarkan rasio efektivitas sebesar 115,20 persen dapat dikategorikan sangat efektif, dan rasio kontribusi pada tahun 2009 sebesar 15,79 persen, pada tahun 2010 sebesar 19,90 persen, tergolong katagori kurang baik, dari tahun 2011-2013 masing-masing sebesar 23,75 persen, 24,50 persen, dan 25,60 persen digolongkan katagori sedang.

Kata kunci: *efektivitas, kontribusi, pendapatan asli daerah*

ABSTRACT

Regional autonomy is authority of local governments to explore its potential improve the fiscal capacity the capital the regional administration. PAD is one of the sources of financing of the most important areas to promote and develop areas interest to many people. PAD is expected to provide largest contribution the Local Revenue. This study aims to determine effectiveness and contribution revenue collection at Regional Income Gianyar regency. Data collection methods used was nonparticipant observation. The variable in this study is the ratio the effectiveness and contribution ratio. Based on the analysis, the effectiveness revenue collection in Gianyar years 2009-2013 based effectiveness ratio of 115.20 percent can be categorized very effective, and the ratio of the contribution in 2009 amounted to 15.79 per cent, in 2010 amounted to 19.90 per cent, belong the category of less good, than in 2011-2013 amounted to 23.75 percent, 24.50 percent, and 25.60 were classified categories

Keywords: *effectiveness, contribution, local revenue*

PENDAHULUAN

Negara manapun di dunia tentu mengalami berbagai masalah dalam membangun perekonomiannya. Indonesia pada tahun 1997 mengalami krisis moneter yang membawa dampak besar terutama pada sektor industry, perdagangan, hotel dan restoran (Soeratno dan Suparmono, 2002). Salah satu bagian dari reformasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan adalah dengan adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Werimon dkk, 2007).

Hirawan (2006) desentralisasi memiliki tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada publik atau masyarakat lebih cepat, tepat, transparansi, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat. Penyelenggaraan otonomi daerah menyebabkan pelaksanaan pemerintahan mengalami perubahan. Perubahan paling mendasar yang terjadi adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Otonomi daerah juga menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Tadjoeddin dan Murshed, 2007). Otonomi daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya yaitu tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Bagi daerah memiliki sumber daya yang potensial, kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang menguntungkan , tetapi sebaliknya tidak begitu menguntungkan bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial. Menurut

Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah paling besar dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa selain pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga akan menstransfer dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk membiayai belanja daerah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Desentralisasi dan Otonomi menjadi tantangan setiap daerah untuk memanfaatkan kewenangan yang diperoleh, dalam menggali potensi yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perlu dilakukan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Yunus, 2010). Hasil desentralisasi pembangunan secara sederhana dapat meningkatkan keadaan ekonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi bagi Negara secara keseluruhan (Pepinsky and Wihardja, 2009).

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman.

Pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayahnya berpotensi untuk dipungut pajak. Adanya potensi-potensi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki.

Akuntabilitas adalah melaporkan bagaimana dana tersebut dibelanjakan melainkan melaporkan bagaimana dana tersebut dibelanjakan secara ekonomi, efisien dan efektif. *Value for money* merupakan konsep yang menerapkan tiga aspek tersebut yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. *Value for money* ini sendiri dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah. Salah satu manfaat dari penerapan konsep *value for money* adalah meningkatkan kesadaran akan penggunaan dana publik (*public cost awareness*) sebagai akuntabilitas publik dan dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur dan perbaikan kinerja pemerintah. Konsep ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nantinya pemerintah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan penggunaan dana yang dikelola untuk memenuhi aspek transparansi, akuntabel dan ekonomi. Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Gianyar adalah Pajak Daerah, Pajak hiburan, pajak hotel dan restoran.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan PAD dan kontribusinya pada Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan PAD dan kontribusinya pada pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar berlokasi di jalan ciwung wanara No.16 Gianyar. Objek yang diteliti adalah efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya pada Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009-2013.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan PAD dan kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. Efektivitas diukur dengan rasio eektivitas yaitu realisasi penerimaan pemungutan PAD dibagi target penerimaan pemungutan PAD. Kontribusi diukur dengan rasio kontribusi yaitu pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo,2009:132). Untuk mengetahui kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2007:234) yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis tingkat efektivitas pemungutan PA tersebut.

Tabel 1.
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Tingkat Kinerja Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
Diatas 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-89	Cukup Efektif
70-79	Kurang Efektif
60-69	Tidak Efektif
Kurang dari 60	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Tabel 2.
Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan PAD

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase	Kreteria
2009	106,852,323,207.63	112,540,530,034.90	105.32	Sangat Efektif
2010	131,592,432,501.99	153,559,078,288.69	116.69	Sangat Efektif
2011	175,273,315,689.94	209,598,193,886.12	119.58	Sangat Efektif
2012	231,217,736,308.44	261,222,177,508.67	112.98	Sangat Efektif
2013	263,262,147,083.99	319,617,604,055.52	121.41	Sangat Efektif

Sumber: Olah Data

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2009-2013 dapat dijelaskan bahwa efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Gianyar pada tahun 2009 sampai dengan 2013 tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 115,20 persen.

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, maka di lakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah (Halim, 2004). Kriteria kontribusi di sajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Kreteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kreteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Yuni, 2005)

Rasio ini mengidentifikasi besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio yang di peroleh berarti semakin besar pula kontribusi PAD tersebut terhadap Pendapatan Daerah. Tabel 4 menunjukkan hasil analisis tingkat kontribusi PAD tersebut.

Tabel 4.
Hasil Analisis Tingkat Kontribusi

TAHUN	PAD	Pendapatan Daerah	Persentase	Kreteria
2009	112,540,530,034.90	712,748,495,510.90	15.79	Kurang Baik
2010	153,559,078,288.69	771,521,566,109.27	19.90	Kurang Baik
2011	209,598,193,886.12	889,407,725,259.37	23.57	Sedang
2012	261,222,177,508.67	1,066,239,510,838.92	24.50	Sedang
2013	319,617,604,055.52	1,248,417,072,519.44	25.60	Sedang

Sumber: Olah Data

Berdasarkan pencapaian tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 2009-2013 dari Tabel 4 dapat diketahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 2009 sebesar 15,79 persen, pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi sebesar 19,90 persen, tergolong dalam katagori kurang baik, dari tahun 2011-2013 masing-masing

sebesar 23,75 persen, 24,50 persen, dan 25,60 persen digolongkan kategori sedang. Artinya Kabupaten Gianyar perlu mengefektifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, sesuai potensi riil yang dihasilkan, sehingga kontribusinya bisa meningkat pada Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Tingkat efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan rasio efektivitas di Kabupaten Gianyar dari tahun 2009-2013 tergolong sangat efektif. Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah dari tahun 2009 dan 2010 dikategorikan kurang baik, dari tahun 2011-2013 digolongkan katagori sedang, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun berikutnya lebih besar.

Yang dapat diberikan adalah Pemungutan PAD yang sudah sangat efektif perlu ditingkatkan dan dipertahankan, dan diwaspadai apakah masing-masing unit atau SKPD di Kabupaten Gianyar telah membuat estimasi penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Kinerja aparat pemungut pajak dan retribusi ditingkatkan dan diefektifkan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Aragon, Fernando. 2009. The Flypaper Effect Revisited. *Economic Organization and Publik Policy Research*. STICERD London of School of Economic.4.
- B. Susiyati Hirawan .2006. Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 6 (2) : 63-82.
- Badan Pusat Statistik. 2007-2010. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propensi Bali*.Bali
- Bakar, Nur Barizah Abu. 2011. Enhancing Malaysian Publik Sector Transparency And Accountability: Lessons and Issues. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 31 (2011)*.
- Dicker, James. 2010. Hou Should We Measure Public Sector Perfomance? Viewpoint Paper for the 2020 Public Service Trust. *2020 Public Services Trust at the RSA*.
- Forum Manajemen STIM/ Denpasar*. Vol 8 (1) : 17-28.
- Hoque, Zahirul and Adams. 2008. Measuring Public Parfomance: A Study of Government Departements in Australia. *ISBN 978-1-876874-46-9*.
- Mahsun, Mohamad. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Perwujudan Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1,hal. 1-17*
- Mutiara Maimunah. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional IX Padang*.
- Nurmayani. 2008. Fungsi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Reformasi Hukum Vol. XI No. 1, hal. 27-42*.
- Pepinsky, Thomas B. and Maria M. Wihardja. 2009. Desentralization and Economic Perfomance in Indonesia. *Cornell University. Center for Strategic and International Studies*. (www.ssrn.com).

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Saputro, Julianto Agung. 2004. Audit Value For Money Menuju Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 15 No. 1, hal.67-74*

Soeratno dan Suparmono. 2002. Kinerja dan Potensi Pengembangan Perekonomian Era Sebelum Otonomi Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen. STIE 4(4). 55-46.*

Tadjoeddin,M. and Murshed, S. 2007. “Socioeconomic Determinants of Everyday Violence in Indonesia : An Empirical Investigation of Javanese Districts, 1994-2003”, *Journal of Peace Research*, 44 (6) : 689-709.